

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah berupa sumber-sumber ekonomi yang nantinya diharapkan menjadi sumber penerimaan daerah atau pendapatan daerah dalam menyangga penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau disebut pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang vital bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.

Konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Panggabean, 2009: 19).

Darise (2009: 128) mengungkapkan bahwa dalam proses Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah

dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah.

Darise (2008: 139) mengungkapkan belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Salah satu dari belanja langsung adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut Sumarmi (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Berbicara mengenai ketergantungan berarti membahas mengenai kemandirian daerah. Artinya kemampuan PAD masih kurang dalam memenuhi belanja publiknya. Kemandirian daerah merupakan kemampuan PAD dalam memenuhi belanja daerah dengan kata lain merupakan kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1: Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kemampuan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

(Nadeak, 2003: 21)

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan

daerah dalam membiayai kebutuhan daerah akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut, dengan kata lain akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah (Setiawan, 2010)

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari 6 Provinsi yang ada di Sulawesi. Berikut ini data kemandirian daerah dan belanja modal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo:

Tabel 1.1: Data Rasio Kemandirian dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Kab/Kota	Tahun	Belanja Modal (Y)	Kemandirian Daerah (X)
Kota Gorontalo	2009	111.013.078.790	12,18
	2010	85.908.709.725	13,11
	2011	113.012.585.600	6,00
	2012	64.055.590.173	14,42
	2013	76.371.017.459	14,82
Kabupaten Pohuwato	2009	128.081.368.715	4,08
	2010	100.581.604.060	2,85
	2011	112.524.679.479	3,92
	2012	88.347.579.158	4,24
	2013	149.768.595.908	6,86
Kabupaten Boalemo	2009	103.224.325.882	3,11
	2010	76.136.399.231	3,03
	2011	81.976.878.681	3,73
	2012	93.604.754.569	5,70
	2013	135.894.547.632	4,98
Kabupaten Gorontalo Utara	2009	146.837.378.010	3,00
	2010	126.310.446.553	2,61
	2011	180.421.055.134	2,51
	2012	114.474.583.546	2,58
	2013	94.612.160.750	2,85
Kabupaten Gorontalo	2009	154.641.472.654	5,59
	2010	90.837.898.571	5,31
	2011	113.816.997.711	2,09
	2012	116.197.937.607	3,51
	2013	144.895.135.942	8,03
Kabupaten Bone	2009	88.688.908.206	3,40

Bolango	2010	55.544.915.421	2,08
	2011	92.104.747.963	3,80
	2012	88.616.280.221	3,52
	2013	145.092.253.654	3,90

Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id>, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian daerah dan belanja modal terus mengalami fluktuasi dari tahun 2009-2013. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi daerah yang belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Masalah yang dapat dilihat juga bahwa belanja modal untuk belanja kepentingan pelayanan publik masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai.

Masalah yang dapat dilihat dari tabel di atas yakni adanya ketidaksesuaian antara teori Setiawan (2010) dengan fakta data yang disajikan di atas. Yakni peningkatan rasio kemandirian daerah dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai peningkatan PAD akan meningkatkan belanja modal dari Pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya terdapat masalah kesenjangan dimana peningkatan rasio kemandirian tidak dibarengi dengan peningkatan belanja modal, contohnya pada Kota Gorontalo tahun 2012.

Sementara masalah dalam hal fenomena, belanja modal merupakan belanja untuk pembangunan dalam rangka pelayanan publik, namun fenomena yang peneliti dapatkan di Kabupaten/Kota bahwa sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango dan Kab. Gorontalo masih kurang memadai. Dapat dilihat dari akses jalan-

jalan yang ada di Kabupaten/Kota provinsi Gorontalo tersebut masih terdapat sebagian jalan rusak, kurangnya perbaikan dan perhatian pemerintah setempat terhadap potensi daerah misalnya, pariwisata yang dapat menopang dan meningkatkan pendapatan dari daerah(GorontaloPost,2015). Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan dana perimbangan yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan pembangunan daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini merefleksikan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2014) Analisis pengaruh kinerja keuangan Daerah terhadap alokasi belanja modal(Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Penelitian ini lebih memfokuskan pada kemandirian daerah dalam hal ini kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka berikut ini identifikasi masalah atas penelitian ini:

1. Adanya kesenjangan antara teori dengan data penelitian yakni peningkatan kemandirian daerah tidak sejalan dengan peningkatan belanja daerah.
2. Kemandirian daerah masih terletak pada tingkat instruktif artinya masih sangat rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang kemandirian daerah dan belanja modal dalam pemerintah daerah. Disamping itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal sehingga tercipta kemandirian otonomi daerah.